PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
SEKRETARIAT DAERAH
BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
Jalan R.T.A. Milono Nomor 1, Palangka Raya, Kalimantan Tengah 73111
Telepon (0536) 3221538, Laman biropbj.kalteng.go.id, Pos-el ukpbj@biropbj.kalteng.g.id

SURAT PERNYATAAN

Nomor: 800/ 391 /Bag.III/PBJ

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	:	SUHARNO, S.T., M.Si
NIP	:	196808061989031013
Pangkat/Golongan	:	Pembina Tingkat I (IV.b)
Jabatan	:	Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa

Dengan ini menyatakan bahwa dalam pelaksanaan kegiatan *Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik* Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025, khususnya pada PPID Pelaksana Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, masih terdapat beberapa kekurangan dalam penyediaan data maupun pelaksanaan aspek-aspek tertentu, sebagaimana uraian berikut:

1. Aspek Sarana dan Prasarana

- **Aplikasi Mobile Publik**: Biro PBJ belum menyediakan aplikasi mobile berbasis iOS/Android. Akan tetapi layanan informasi publik sudah tersedia melalui website yang dirancang *responsive*, sehingga dapat diakses melalui perangkat mobile dengan mudah dan oleh karenanya pengembangan aplikasi khusus belum dianggap perlu untuk direalisasikan.
- **Layanan Inklusif bagi Penyandang Disabilitas**: Belum tersedia.

2. Aspek Kualitas Informasi

- **Daftar Informasi Dikecualikan (DIK)**: Belum disusun dan ditetapkan untuk tahun 2024, sehingga belum memenuhi ketentuan dalam Perki No. 1 Tahun 2021.
- **Jangka Waktu dan Dasar Hukum Pengecualian**: Belum tercantum secara jelas dalam dokumen uji konsekuensi karena DIK belum disusun.
- **Informasi yang Telah Habis Masa Pengecualiannya**: Belum dikategorikan ulang sebagai informasi terbuka.
- **Sosialisasi Anti-HOAX**: Belum dilaksanakan karena belum adanya standar mekanisme penanganan informasi hoaks yang terkait dengan tugas dan fungsi Biro PBJ. Kegiatan ini akan dilaksanakan sesuai dengan ketersediaan anggaran.

3. Aspek Jenis Informasi

Beberapa jenis informasi belum tersedia atau belum dipublikasikan, antara lain:

- Risalah rapat pembentukan regulasi, keputusan, atau kebijakan.
- Rancangan peraturan, keputusan atau kebijakan yang dibentuk.
- Data statistik yang dikelola oleh Biro PBJ.
- Surat perjanjian dengan pihak ketiga beserta dokumen pendukung.
- Persyaratan perizinan dan laporan kepatuhan izin (untuk OPD yang relevan).
- Agenda kerja pimpinan tahun 2024.
- Informasi pelanggaran hasil pengawasan internal dan tindak lanjutnya.

4. Aspek Komitmen Organisasi

Dokumen atau bukti kegiatan berikut belum tersedia sepenuhnya, dikarenakan beberapa belum pernah ditangani atau belum pernah mendapatkan pelaporan:

- Penanganan keberatan informasi publik .
- Penyelesaian sengketa informasi.
- Surat jawaban penolakan permohonan informasi oleh PPID.
- Surat pemberitahuan perpanjangan waktu pemberian informasi.
- Surat jawaban atas permohonan informasi yang diterima.
- Bukti pelaksanaan hasil putusan sengketa informasi.

5. Aspek Digitalisasi

- **Layanan Interaktif Digital**: Belum tersedia layanan seperti podcast, YouTube Channel, atau siaran langsung (live streaming) secara berkala.
- **Informasi Hak Pemohon**: Belum diumumkan secara spesifik informasi mengenai hak pemohon untuk mengajukan keberatan atau sengketa informasi.
- **Formulir untuk Disabilitas**: Belum tersedia e-formulir atau formulir fisik permohonan informasi dan keberatan yang ramah disabilitas.

6. Aspek Pengadaan Barang dan Jasa

- **Surat Jaminan:** (Pelaksanaan, Uang Muka, dan Pemeliharaan) Dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa oleh Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, Surat Jaminan (baik Jaminan Pelaksanaan, Jaminan Uang Muka, maupun Jaminan Pemeliharaan) tidak dipersyaratkan. Ketentuan ini selaras dengan regulasi pengadaan pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Peraturan tersebut memberi ruang bahwa surat jaminan hanya diwajibkan untuk jenis pengadaan tertentu (Diberlakukan untuk Kontrak Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai

paling sedikit di atas Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan tidak diperlukan untuk Pengadaan Barang/Jasa melalui *E-Purchasing* atau jika secara eksplisit diminta.

Kami menyadari bahwa ketersediaan dokumen dan pelaksanaan seluruh aspek di atas sangat penting dalam mendukung proses monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, khususnya di Biro Pengadaan Barang dan Jasa.

Kami berkomitmen untuk terus melakukan perbaikan dan pemenuhan terhadap seluruh indikator Monev Keterbukaan Informasi Publik sebagaimana ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya, untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Palangka Raya, 30 Juli 2025
KEPALA BIRO,

SUHARNO, S.T., M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 196808061989031013